

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Malik Haramin dan M.F. Nurhuda Y, 2000, *Mengawal Transisi, Refleksi Atas Pemantauan Pemilu 99*, JAMPPI-PB PMII dan UNDP, Jakarta.

A. Malik Haramin, 2004. *Gus Dur, Militer dan Poliiik*, LKIS, Yogyakarta

Abdul Rasyid Thalib Dan M. Sh, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti.

Abdurrachman Satrio, *Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, Interaksi Konstitusi dan Politik, 2016.

Adnan Buyung Nasution, dkk, 1997, *Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Agung Putri, 2002. *Berjuang Mengungkap Kebenaran dan "Mengadili" Masa Lampau: Pengalaman Rakyat Negeri Tertindas dalam buku Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, ELSAM, Jakarta.

Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam "Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat"*, Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah.

Aji Wibowo, 2005, *Analisis Terhadap Indeks kemajuan Ham Di Indonesia. Dalam Hukum Humaniter, HAM, dan Hukum Pengungsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Tri Sakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Universitas Tri Sakti.

Anis Widyawati, 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sanit, 1998. *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



Azyumardi Azra, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Dr. Suparman Marzuki, 2017 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham Uii.

Dwi Putra Nugraha, dkk, 2017. *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.

E. Yulianto. 2000. *Demokrasi. Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Keuangan Negara*. Kelompok Studi Keuangan dan Kebijakan Publik. Yogyakarta.

Eddie Riyadi dan Sondang Friska, 2007, *Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Dan Kejahatan Perang*, cetakan pertama, Jogjakarta: Elsam.

Eddy O.S hiariej, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Jakarta: Erlangga.

Eddy O.S. Hiariej, 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.

Eko Riyadi ed, 2012, *To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cet-I, Jogjakarta: Pusham Ull.

Erasmus Cahyadi ed, 2007, *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: Elsam.

Erfandi, 2014, *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.

Erikson Hasiholan Gultom, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional Dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Timor-Timur*, Jakarta: Tatanusa.

Fadli Andi Natsif, 2021, *Hukum Pelanggaran HAM Teori dan Analisis Kasus*, Gowa: Subaltem Inti Media.

G.J Wolhoff, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta, Timus Mas.

ious Syahdan, 2004. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Pondok Edukasi, Malang.



H.A Prayitno dan Trubusrahardiansah, 2008, *Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Universitas Tri Sakti.

Harifin H Tumpa, 2010, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan Ham Di Indonesia*, Cet-I, Jakara: Kencana.

ICTJ dan KontraS, 2011. *Keluar Jalur Keadilan Transisional di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, Laporan Bersama ICTJ dan KontraS.

Ifdhal Kasim ed, 2000, *Mahkama Pidana Internasional*, Cet-I, Jakarta: Elsam.

Jimly Asshiddiqie, 2005, "*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", Makalah untuk studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

Jimly Asshiddiqie, 2005. *Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*.

KontraS, 2016, *Bahan Advokasi Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, KontraS, Jakarta.

Lady Lesmana DKK, 2011, *Memahami Dengan Lebih Baik*, Jakarta: Grafindo Persada,

M. Mas'ud Said. 2009. *Birokrasi di Negara Birokratis : Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi di Indonesia*. UMM Press, Malang.

Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta.

Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, cetakan-III.

Mangai Natarajan, 2015. *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Nusa Media, Bandung.

os Van Norloos, 2021, *A Critical Reflection on the Right to the Truth about Gross Human Rights Violations*, Oxford University Press.



Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

MPR RI, 2003. *Perpaduan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral MPR-RI, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press, Yogyakarta.

Osentino Amado dan Nihal Bhuta, *Mekanisme Peradilan Internasional Untuk Timor Lorosae*, Dili: Perkumpulan HAK dan Fokus Pers, Tanpa Tahun.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pradjarta Dirdjosanjata dan Nico L. Kana, 2006. *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, Pustaka Percik, Salatiga.

Rhoda E. Howard, 2000, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Terjemahan Dari Human Rights And The Search For Community. Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.

Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim (Ed.), 2002. *Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik di Indonesia*, AIPI, Jakarta.

Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Pengadilan Ham Di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ruti G Teitel, 2004, *Keadilan Transisi, Sebuah Tinjauan Analitis-Komprehensif*, (Terjemahan Elsam Dari Transisional Justice), Cet Pertama, Jakarta: Elsam,.

Ruti G. Teitel, 2004, *Keadilan Transisional: Sebuah Tinjauan Komprehensif*, Elsam, Jakarta.

Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, FH-UI, Jakarta.



t Introduction Focus On Transisional Justice, *International Center For Transisional Justice*. Reprt of the secretary general, 23 Agustus 2004.

Slamet Efendi Yusuf dan Umar Basalim, 2000. *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin. 2007, *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam RKUHP*, Cet-I, Jakarta: Elsam.

Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Suparman Marzuki, 2012. *Pengadilan Ham Di Indonesia.*, Cet Pertama, Jakarta: Airlangga.

Suparman Marzuki, 2014. *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia*. Erlangga, Jakarta.

Suparman Marzuki, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Pusham UII.

Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Yogjakarta: PUSHAM-UII.

Supriyadi Widodo Eddyono & Zainal Abidin, 2016, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoh Ukhuwah Grafika.

Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer* Cetakan Pertama, Jogjakarta: Laksbang Pressindo.

Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer* Cetakan Pertama, Jogjakarta: Laksbang Pressindo



qurrahman Syahuri, 2004. *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya dengan Negara Lain di Dunia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

- Theo Van Bohen, 2001, *Tentang Mereka Yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompenisasi, Dan Rehabilitasi*, Terjemah Elsam, Jakarta: Elsam.
- Theo Van Boven, 2001, *Tentang Mereka ynag Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta: Elsam.
- Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, 2007. *Praktik Kompensasi Dan Restitusi Di Indonesia sebuah Kajian Awal*, ICW, Jakarta.
- Wahyuni Djafar, 2012, *Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu: mendorong inisiatif masyarakat sipil dan memastikan negara bertanggungjawab*, Elsam.
- Yohanes De Masinus Arus, 2003, *The Right To Know The Truth, Kerangka Normatif Mengungkap Kebenaran, Dalam Pencarian Keadilan Di Masa Transisi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Elsam.
- Zainal Abidin, 2014, *Pelanggaran HAM Dan Hak Korban, Dalam Panduan Bantuan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Aulia Rosa Nasution, 2018. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Mercatoria, Vol. 11.
- Biljana Kostadinov, 2012. *Constitutional Identity*, Iustinianus Primus Law Review, Vol. 3 No. 1.
- Cipto Prayitno, 2018. *Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prespektif Constitution Making*, Jurnal Konstitusi, Vol. 5 No. 4, Desember.
- David Cohen, 2004. *Intended to Fail, The Trial Before the Ad Hoc Human Right Court in The Jakarta*, ICTJ.
- Edi Herdyanto, 2006. *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu*, Yustisia Edisi Nomor 69.
- Andi Natsir, 2016, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jurnal Hukum Jurisprudensi, Vol. 3, No. 2.



Herry Sucipto Dan Harjianto Tohari, 2012, *Penanganan Pelanggaran berat HAM Masa Lalu, Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Masa Lalu*, Dignitas, Vol. 8, No 1.

Heru susanto, 2006, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Dinamika HAM, Vol. 6 Nomor 2, Mei 2006.

Miftah Idris dan Abdul Maasba Magassing, 2023, *The Supremacy Of law In Human Right Enforcement (A Solution To Settlement Of Human Rights Violations)*, International Journal of Education, Vol. 2, No. 3

Ika Kurniawati, 2022. *Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provisions) Sebagai Identitas Konstitusi*, Lex Renaissance, No. 2, Vol. 7 April.

Jiwon Suh, 2023, *Human Rights and Corruption in Stelling the Accounts of the Past, Transitional Justice Experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia*, Seul National Univercity.

Karlina Leksono Supeli, 2001, *Tidak Ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1, No. 3, Maret-Juni 2001

Kartini Sekartadji, 2017. *Prospek dan Tantangan International Criminal Court*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 34, No.2.

Kontras. 2006. *Laporan Pemantauan Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan HAM ELSAM-KONTRAS-PBHI "Pengadilan Yang Melupakan Korban"*

Luthfi Widagdo Eddyono, 2019. *Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September.

Marieke Zoodsma dan Juliette Schaafsma. 2021. *Examining the Age of Apology: Insights from the Political Apology Database*, Journal of Peace Research, Vol. 59, No. 3.

Monika Polzin, 2016, *Constitutional Identity, Unconstitutional Amendments and The Idea of Constituent Power: The Development of the Doctrine of Constitutional Identity in German Constitutional Law*, International Journal of Constitutional Law, Vol. 14, hlm. 411-438,



hammad Asrun, 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni.

- Muhammad Miharadi, 2002. *Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis*, Jurnal Keadilan, Vol.2 No.2.
- Pan Mohamad Faiz, 2020. *Menguji Konstitusionalitas Amandemen Konstitusi*, Majalah Konstitusi, No. 164, Oktober.
- Progres Report ELSAM IV, *Pengadilan HAM di bawah standart. Preliminary Report*
- Romi Librayanto, dkk, 2022, *Antinomy: Fulfillment Of The Right To Work Andthe Right To Have A Good And Healthy Environment Duringthe Covid-19*, Russian Law Journal, Vol. 10, No. 3
- Salman Luthan, 2007, *Relevansi Peradilan Pidanainternasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Of The International Criminal Court*, Jurnal Hukum, Yogyakarta, Vol.14, No. 4, 2007.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, 2014. *Catatan Atas Pemenuhan Hakatas Reparasi Korban Pelanggaran Ham Berat*, Jurnal Perlindungan | Edisi 4 Vol I.
- Suwardi Martowirono, 2017. *Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4.
- Tenang Haryanto, dkk, 2008. *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tim Universitas Indonesia, *Pendapat Universitas Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, (makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 4 Desember 2003).
- Tosa Hiroyuki, *Keadilan Transisional Yang Terabaikan, Tinjauan Ulang Masalah Indonesia Dan Timor-Timur*.
- 1, 2019, *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Internasional*, Jurnal IUS, Vol 7, April 2019, hal. 172



C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

D. Lainnya

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law;

CNN Indonesia, *RI Diminta Tiru Belanda Minta Maaf atas Pelanggaran HAM*

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218200117-32-761179/ri-diminta-tiru-belanda-minta-maaf-atas-pelanggaran-ham-berat>, diakses tanggal 10 Desember 2023, pukul 04.45 WITA

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985



[://www.cnnindonesia.com/nasional/20221229152814-12-893709/tim-ppham-serahkan-laporan-penyelesaian-kasus-ham-berat-ke-pemerintah](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221229152814-12-893709/tim-ppham-serahkan-laporan-penyelesaian-kasus-ham-berat-ke-pemerintah) diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 00.33 WITA.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/11/elsam-sebut-pengakuan-resmi-negara-pecah-kebuntuan-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat> di akses pada tanggal 10 Desember, pada pukul 13.00

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/presiden-harus-cabut-dan-batalkan-keppres-pembentukan-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/> diakses pada tanggal 10 Desember, pukul 13.00

International Law Commission Draft on Responsibility of state for Internationally Wrongfull Act 2001, "Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State".

Kontras, 2023, *Peluit Panjang untuk Menghentikan Buruknya Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM dan Praktik Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Non Yudisial di Indonesia*, <https://kontras.org/2023/06/27/peluit-panjang-untuk-menghentikan-buruknya-kick-off-pelaksanaan-rekomendasi-ppham-dan-praktik-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-secara-non-yudisial-di-indonesia>

Sekretariat Negara, *Pernyataan Pers Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat dalam* https://www.setneg.go.id/baca/index/ Pernyataan_pers_presiden_ri_tentang_pelanggaran_ham_berat , diakses pada 9 Desember 2023, pukul 03.54 WITA

